



**LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2004**

**IRRASIONALITAS DALAM MODERNISASI
STUDI TENTANG MODERNISASI DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF TEORI KRITIS**

Peneliti:

Drs. Edy Herry Pryhantoro, M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi

DIP Nomor : 004/XXIII/1/--/2004 Tanggal 3 Januari 2004

Kontrak Nomor : 108/P2IPT/DPPM/DM, SKW/III/2004

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 34.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2004



LP 137/05 ✓
try
i

LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2004

**IRRASIONALITAS DALAM MODERNISASI
STUDI TENTANG MODERNISASI DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF TEORI KRITIS**

Peneliti:

Drs. Edy Herry Pryhantoro, M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi

DIP Nomor : 004/XXIII/1--/2004 Tanggal 3 Januari 2004

Kontrak Nomor : 108/P2IPT/DPPM/DM, SKW/III/2004

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 34.

013705141

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2004



LEMBAGA PENELITIAN

- 1. Puslit Pembangunan Regional
- 2. Puslit Obat Tradisional
- 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
- 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
- 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
- 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
- 7. Puslit Olah Raga
- 8. Puslit Bioenergi
- 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
- 10. Puslit Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian : IRASIONALITAS DALAM MODERNISASI
Studi tentang Modernisasi di Indonesia
Indonesia dalam Perspektif Teori
Kritis.

b. Kategori Penelitian : I / II / III

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Edy Herry Pryhantoro, MSi.

b. Jenis Kelamin : Pria

c. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Tk, I/III d/132009468

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Fakultas/Puslit./Jurusan : FISIP/Sosiologi.

f. Univ./Inst./Akademi : Universitas Airlangga

g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Sosial (Studi Pembangunan)

3. Jumlah Tim Peneliti : 1 Orang

4. Lokasi Penelitian : -

5. Kerjasama dengan Institusi Lain : -

a. Nama Instansi : -

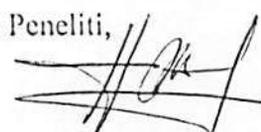
b. Alamat : -

6. Masa Penelitian : 5 Bulan

7. Biaya yang Diperlukan : Rp 6.000.000 ,-
(Enam Juta Rupiah)

Surabaya, 20-12-2004

Ketua Peneliti,



Drs. Edy Herry Pryhantoro.
NIP. 132009468

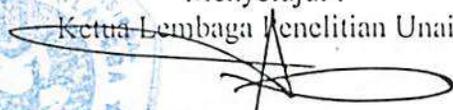
Mengetahui



Dekan Fakultas Ruslit
FD FISIP
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Surabaya, 20 Desember 2004
NIP. 132009468



Menyetujui :



Ketua Lembaga Penelitian Unair,
Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN

Irasionalitas dalam Modernisasi: Studi tentang Dampak Pembangunan dalam Perspektif Teori Kritis. (Edy Herry Pryhantoro: 2004. 57 halaman)

Pada umumnya kajian teori pembangunan (modernisasi atau developmentalisasi) lebih banyak menggunakan pendekatan struktural – fungsional yang memakai kategori – kategori ekonomis, politis dan teknologis yang diakui bersifat “obyektif”. Modernisasi dipandang sebagai proses penataan infra dan supra – struktur masyarakat menurut kriterium – kriterium yang netral dan kesadaran manusia, dimana seolah – olah strukturlah yang menjadi paling penting sementara tugas kesadaran manusia sekedar menyesuaikannya. Bahkan seolah – olah mesin yang menggerakkan proses modernisasi sudah dirakit berdasarkan petunjuk – petunjuk obyektif, yang dibutuhkan tinggal tenaga-tenaga untuk menggerakkannya. Padahal seperti ditemukan Berger melalui analisis fenomenologisnya dalam *Pyramids of Sacrifice* (1967) bahwa kesadaran manusia dan struktur dalam modernisasi adalah dua hal yang tidak saling eksklusif, keduanya saling mengandaikan, sebab ilmu dan pengetahuan terapan yang menjadi dasar modernisasi terbentuk dan berkembang dalam media kepentingan (kesadaran) tertentu.

Harus diakui bahwa karena sejak awal munculnya teori modernisasi dimaksudkan untuk mengimbangi pengaruh yang meluas dari ideologi sosialisme – komunisme. Maka secara logis ideologi besar Kapitalisme. Penyebaran kapitalisme yang menggunakan teori modernisasi sebagai “kuda troya” (*the trojans horse*) pada akhirnya menimbulkan berbagai krisis manakala sisi gelap kapitalisme (akumulasi modal dan mode produksi yang impersonal) bertemu dengan sisa- sisa feodalisme yang masih kuat atau dengan kepentingan yang bercokol (*vested interest*) dari sekelompok “elite jahat” yang berkuasa di negara-negara berkembang. Yang muncul kemudian adalah berbagai bentuk monopoli, birokrasi yang korup dan kolusif serta bentuk – bentuk yang lebih spesifik dari kapitalisme seperti *ersatz capitalisme*, *networking capitalisme* dan *cromy capitalisme*. Yang disebut terakhir ini terbukti dalam jangka panjang memicu krisis yang berkepanjangan di Indonesia sebab telah menciptakan berbagai kondisi yang kontra produktif bagi proses modernisasi itu sendiri, suatu kondisi yang berlawanan dengan tujuan pembangunan itu sendiri dan menjadi bagian dari apa yang disebut irasionalitas dalam modernisasi.

Melalui pendekatan kritis dalam penelitian ini hendak dibongkar mitos-mitos pembangunan dan potensi krisis yang ada di dalamnya. Dan karena penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa akar pemikiran atau “ideologi tersembunyi” yang mendasari teori modernisasi adalah kapitalisme – liberalisme maka menjadi hal menarik untuk mengkaji penerapan modernisasi di Indonesia dihubungkan dengan model kapitalisme yang kemudian muncul. Sejauh mana model yang lebih spesifik dari kapitalisme tersebut relevan dengan semangat modernisasi yang mengutamakan efisiensi dan profesionalisme subyeknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, industrialisasi dan kapitalisme pada dasarnya adalah suatu entitas yang sama. Ketika modernisasi diterapkan di Indonesia ia mewujud sebagai bentuk kapitalisme yang telah terdistorsi oleh berbagai *vested interest* dari kelompok – kelompok kepentingan yang mengawinkan kekuasaan politik dengan akumulasi modal.

Jika pembangunan adalah suatu usaha manusia secara rasional untuk keluar dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan terhadap sesuatu di luar dirinya, maka ketika pembangunan menjadi sebuah ideologi yang bersifat memaksa dan menundukkan segala hak dan kepentingan individu semata-mata demi tetap berputarnya roda kapitalisme, maka dengan sendirinya usaha untuk membangun tadi menjadi irasional. Usaha pembangunan menciptakan irasional karena justru merupakan proses pembodohan, pemiskinan dan menyebabkan ketergantungan yang lebih besar dari individu kepada institusi yang bernama negara. (Lemlit Universitas Airlangga Surabaya. Kontrak Nomor: 108 / P4T / DPPM / DM, SKW / III / 2004. Tanggal 21 Mei 2004).

SUMMARY

Irrationality in Modernization: The Study of Development Impact on the Critics Perspective. (Edy Herry Pryhantoro, 2004 74 pages).

Generally the study of development theory (modernization or developmentalism) usually uses structural – functional approach that engages economic categories, politics and technologies recognized it has “objective” nature. Modernization is viewed as processing of the infrastructure and superstructure of society according to neutrality criteria of human being consciousness in which the structure acts as if the most important subject while human being’s consciousness function, however, bring into line or adjust to the structure. Moreover, it seems that the machinery that moves modernization process has been assembled according to objectives directions, so the only needed is the personal to drive. Whereas, as like discovery by Berger according to his phenomenological theory in *The Pyramids of Sacrifice* (1967) that a man’s consciousness and his structure in the modernization represent two fact that is not mutual exclusive each others, both mutual suppose due to practical science and acknowledgement that create the modernization and grow in the certain interest media.

It must be acknowledged that due to since beginning of the emerge modernization theory aimed to make balance of spreading influence from the socialism – communism, then logically “hidden ideology” of the modernization theory is the major ideology: capitalism. Spreading of capitalism that the uses modernization theory as “the Trojan horse”, finally, emerges various crises. When the darkness side of capitalism (capital accumulation and impersonal production mode) meets with the feudalism remains that still have predominant or the vested interest reside from a number of group “evil - elite” that holds the authority in the countries. The subsequences are the various monopoly, the corrupt bureaucracy, and some specific collusive activities from the capitalism as like ersatz capitalism, networking capitalism, and crony capitalism. The latest of proved to trigger the prolongation crises in Indonesia in self, a situation in which the development objectives is confronted as well as becomes part of irrationality in modernization.

The result of this research shows that modernization, industrialization and capitalism actually represents same entities. When modernization is applied in Indonesia, it manifest as capitalism from that has been distorted by various vested interest from the interest group marrying politic power and capital accumulation.

If the development resembles the human being’s exertion rationality aimed to resolve the stupidity, property, underdevelopment, and dependent from the external power. Then the development becomes an ideology that has a coercive power nature and conquered every individual right and interest for the sake of the capitalism driving wheel. Then through the development it’s self the above exertion to develop becomes an irrational manner. The development exertion creates a paradox because it is precisely stupidity making, property, invoking, and induces the more tremendous dependent form individual toward the institution that we call it: nation – state. (The Research Institution of Airlangga University. Surabaya. Contract number: 108/P4TDPPM/DM, SKW/III/2004, 21 May 2004)

KATA PENGANTAR

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia memberikan pandangan – pandangan baru dan dimensi – dimensi baru terhadap studi pembangunan di Indonesia. Setelah sekian lama didominasi oleh wacana pembangunan yang bersifat teknokratis, muncul berbagai pandangan kritis yang mengatakan bahwa pembangunan juga telah menciptakan berbagai irasionalitas di dalamnya. Irasionalitas – irasionalitas inilah yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini mencoba memasukkan beberapa analisis yang bersifat kritis terhadap praktek pembangunan di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Maksud ini didasari oleh suatu harapan agar berbagai wacana teori kritis yang selama ini sekedar menjadi *rational world* bisa menemukan penerapannya dan menemukan manfaatnya dalam pembahasan mengenai teori pembangunan dan hasil – hasilnya.

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik sebagai lembaga maupun perorangan, yang mengingat sempitnya ruang, tidak disebutkan satu persatu disini. Kepada mereka semua ucapan terima kasih saya sampaikan. Terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala kemahabijaksanaan-Nya telah memberikan ketenangan pikiran, konsentrasi dan kesehatan sehingga studi ini bisa terselesaikan.

Surabaya, 01 November 2004

Peneliti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1. Modernisasi Sebagai Gejala Sosial	9
II.2. Rasionalitas Instrumental Sebagai Dasar Modernisasi	13
II.3. Teori Kritis Sebagai Usaha Pencerahan	15
II.4. Krisis Dalam Masyarakat Modern	18
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	21
III.1. Tujuan Penelitian	21
III.2. Manfaat dan Kontribusi Penelitian	23
BAB IV METODE PENELITIAN	25
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	28
V.1. Keberhasilan Pembangunan Orde Baru	28
V.2. Irasionalitas Dalam Modernisasi Orde Baru	39
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

L1. Latar Belakang Masalah

Mulai dekade 50 - an kata "*develpoment* atau pembangunan menjadi sangat massif dan cenderung menjadi "agama baru" bagi negara - negara yang secara sukarela maupun terpaksa - telah menerima stempel atau cap sebagai negara - negara sedang berkembang. Agenda utama penerapan modernisasi kemudian ditengarai lebih banyak diwarnai oleh kepentingan negara - negara maju. Meskipun kepentingan - kepentingan ini berlindung di balik rumusan teori yang mencoba mengadaptasi secara rasional kondisi obyektif negara - negara sedang berkembang.

Pada umumnya kajian teori pembangunan (modernisasi atau *developmentalisme*) lebih banyak menggunakan pendekatan struktural - fungsional yang memakai kategori - kategori ekonomis, politis dan teknologis yang diakui bersifat "obyektif". Modernisasi dipandang sebagai proses penataan infra dan supra - struktur masyarakat menurut kriterium - kriterium yang netral dari kesadaran manusia, dimana seolah - olah strukturlah yang menjadi paling penting sementara tugas kesadaran manusia sekedar menyesuaikannya. Bahkan seolah - olah mesin yang menggerakkan proses modernisasi sudah dirakit berdasarkan petunjuk - petunjuk obyektif. Yang dibutuhkan tinggal tenaga - tenaga untuk menggerakkannya. Padahal seperti ditemukan Berger melalui analisis fenomenologisnya dalam *Pyramids of Sacrifice* (1967) bahwa kesaran

manusia dan struktur dalam modernisasi adalah dua hal yang tidak saling eksklusif, keduanya saling mengandaikan, sebab ilmu dan pengetahuan terapan yang menjadi dasar modernisasi terbentuk dan berkembang dalam media kepentingan (kesadaran) tertentu.

Modernisasi dengan demikian, secara epistemologis, merupakan wujud dari paradigma positivisme yang berasumsi dengan penjelasan tunggal untuk semua bentuk fenomena sosial. Bagi Habermas paradigma semacam ini disebut *instrumental knowledge* dimana pengetahuan menjadi alat untuk mendefinisikan sekaligus selanjutnya mendominasi obyeknya.

Kenyataan menunjukkan bahwa sampai dengan pertengahan 80-an di Indonesia ditengarai masih dominannya pendekatan – pendekatan yang cenderung meremehkan manusia sebagai aktor modernisasi. Manusia sekedar menjadi obyek pembangunan sehingga muncul gugatan dari pakar ilmu sosial, khususnya sosiologi, pada waktu itu untuk menjadikan manusia sebagai subyek pembangunan.

Teori struktural – fungsional memandang masyarakat sebagai jaringan fungsionalistik menurut pola disposisi rasionalitas instrumental. Pada kenyataannya teori ini hanya sanggup merekam kompleksitas sistem, namun tidak sanggup memperlihatkan segi normatif suatu masyarakat yang memungkinkan transformasinya (Axel Holneth, dalam Giddens: 1987).

Ketidakpuasan yang meluas terhadap pendekatan struktural fungsional dalam modernisasi tidak lepas dari kegagalan berbagai asumsi dasar teori modernisasi, seperti gagalnya teori efek menetes ke bawah (*trickledown effect*).

Disamping munculnya kesadaran baru dari para teknokrat bahwa teori modernisasi yang mereka kembangkan dan terapkan mengandung mitos – mitos tersembunyi yang secara potensial akan menimbulkan krisis.

Krisis ini secara luas menyangkut harkat kemanusiaan para warga negara berkembang. Yang dalam terminologi Berger disebut sebagai biaya sosial. Sedangkan dalam perspektif yang lebih sempit krisis ini menyangkut masalah ekologi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh bentuk – bentuk spesifik kapitalisme di berbagai negara berkembang.

Harus diakui bahwa karena sejak awal munculnya teori modernisasi dimaksudkan untuk mengimbangi pengaruh yang meluas dari ideologi sosialisme-komunisme, maka secara logis “ideologi tersembunyi” dari teori modernisasi adalah ideologi besar kapitalisme. Penyebaran kapitalisme yang menggunakan teori modernisasi sebagai “kuda troya” (*the trojans horse*) pada akhirnya menimbulkan berbagai krisis manakala sisi gelap kapitalisme (akumulasi modal dan mode produksi yang impersonal) bertemu dengan sisa – sisa feodalisme yang masih kuat dengan kepentingan yang bercokol (*vested interest*) dari sekelompok “elite jahat” yang berkuasa di negara- negara berkembang. Yang muncul kemudian adalah berbagai bentuk monopoli, birokrasi yang korup dan kolusif serta bentuk – bentuk yang lebih spesifik dari kapitalisme seperti *ersatz capitalism*, *networking capitalism* dan *crony capitalism*. Yang disebut terakhir ini terbukti dalam jangka panjang memicu krisis yang berkepanjangan di Indonesia sebab telah menciptakan berbagai kondisi yang kontra produktif bagi proses modernisasi itu sendiri.

Alasan lain diluar itu adalah dengan munculnya pemikir – pemikir baru seperti Gunnar Myrdar, Peter L. Berger, Paulo Freire dan E.F Schumacer yang semuanya ini masih meraba – raba dalam mencari teori pembangunan yang paling tepat bagi negara sedang berkembang. Fenomena ini tidak lain adalah reaksi kritis terhadap teori – teori pembangunan yang selama tiga dasawarsa terakhir ini sangat laku di negara berkembang. Di samping itu juga dengan semakin berkembangnya wacana (diskursus) yang lebih kritis dari ilmu – ilmu sosial produk Eropa, seperti diintrodusirnya sosiologi kritis di bidang sosiologi dan varian Neo – Marxisme dari Antonio Gramsci di bidang ilmu politik, yang menarik perhatian para ilmuwan sosial generasi 80 – an yang seolah – olah memperoleh “pencerahan” dari teori – teori sosial tersebut.

Pendekatan – pendekatan kritis terhadap praktek pembangunan di Indonesia membuka cakrawala baru dimensi – dimensi modernisasi serta membantu masyarakat akademis menguak mitos – mitos yang terselubung di dalamnya. Semakin muncul kesadaran bahwa praktek pembangunan di Indonesia menjadi ideologis, dalam arti hanya menjadi alat kepentingan sekelompok elite tertentu (ideologi disini diartikan sebagai suatu bentuk kesadaran palsu, sebagai semacam doktrin atau claim tidak wajar demi tercapainya kepentingan kelompok elite tersebut; sedangkan yang dimaksudkan dengan elite disini adalah kelompok militer (Angkatan Darat) yang berkolaborasi dengan investor asing dengan menggunakan teknokrat dan teknokrasi sebagai alat kepentingannya). Dan ketika pembangunan menjadi bersifat ideologis, maka ia juga menjadi kesadaran palsu bagi rakyatnya, yang akan menindas segala bentuk emansipasi dan suara kritis

rakyat. Dalam konteks inilah pembangunan menjadi “pembangunanisme”, menjadi berhala baru yang kepadanya segenap potensi tenaga – tenaga kreatif (partisipasi rakyat: dunia akademis, organisasi sosial dan politik) maupun tenaga tenaga produktif (struktur ekonomi: alat kerja, buruh dan teknologi) ditundukkan demi tetap berjalannya “mesin besar” kapitalisme. Penindasan pembangunan sebagai ideologi (sebagai pembangunanisme) terletak dalam: “semakin intensifnya penundukan individu di bawah mitos pertumbuhan dan mekanisme penjagaan stabilitas nasional”. Dan karena bersifat ideologis itu pula maka penindasan itu hilang dari kesadaran masyarakat, karena legitimasinya terletak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh ketenangan situasi ekonomi politik yang memungkinkan individu menjadi semakin nyaman. Di samping itu janji – janji pembangunanisme seperti: ‘tahap tinggal landas’, ‘menuju masyarakat adil dan makmur’, ‘mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi’ dan retorika semacam itu menjadi candu bagi rasionalitas individu. Di sini rasionalisasi yang menjadi dasar tindakan sosial justru menjadi irasional.

Masyarakat yang terpesona dengan retorika pembangunanisme tanpa disadari ditelan oleh kekuasaan mesin birokrasi yang menjadi pengendali utama program – program pembangunan sebagai sistem total yang menguasai berbagai bidang kehidupan manusia, bahkan ke bidang kehidupan yang bersifat pribadi (misalnya di bidang kependudukan seperti menentukan jumlah anak, memilih jenis alat kontrasepsi, dll). Dengan mengadaptasi pikiran Herbert Marcuse dapat dikatakan: Dewasa ini kekuasaan melestarikan dan memperluas dirinya tidak

hanya melalui pembangunan melainkan sebagai pembangunanisme, dan pembangunan menyediakan legitimasi yang memperkuat kekuasaan politis yang semakin meluas dan total, yang mengabsorpsi segala bidang kebudayaan manusia (lihat Marcuse dalam: Habermas, 1990).

Telah diketahui bersama bahwa adopsi teori modernisasi di negeri ini dibawa dari tradisi pemikiran Amerika yang pragmatis dan utilitarianis. Diketahui pula bahwa pendekatan struktural – fungsional yang berkembang di dalamnya banyak diilhami oleh cara berpikir Parsonian, sementara itu Talcot Parson adalah pengagum Max Weber yang berusaha menjabarkan pemikiran Weber ke dunia akademis Amerika. Maka tidak berlebihan jika dalam penelitian ini akar permasalahan yang hendak dianalisis – yakni persoalan paradox modernitas dan diskursus tentang kapitalisme yang mendasari proses modernisasi – dicari kembali ke isu yang sejak mula dilontarkan Weber, yakni rasionalitas instrumental sebagai dasar rasionalisasi dalam modernisasi. Apa yang telah diuraikan di atas, yakni yang menyangkut pembangunanisme di Indonesia, sesungguhnya merujuk langsung pada diskursus Teori Kritis (Mazhab Frankfurt) tentang Paradox Modernitas, yang merupakan titik Mazhab Frankfurt (melalui tokoh – tokohnya: Theodore W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse dan Jurgen Habermas) terhadap dunia industrial modern masyarakat barat. Secara singkat Paradox Modernitas dijabarkan sebagai berikut:

Modernisasi yang pada mulanya merupakan pembebasan manusia dari berbagai kungkungan dominasi mitos ideologi dan tradisi pada akhirnya menjadi dominasi dalam wajah baru. Otonomi manusia dan kebebasan yang berhasil diraih dengan penghancuran masyarakat tradisional beserta tradisi – tradisi kulturalnya malah kembali raib dalam kerangkeng besi (*iron cage*)

birokrasi dan teknologi yang merupakan perwujudan praktis dari rasionalitas yang diraihinya”.

Disebut sebagai paradox karena manusia dalam modernisasi, semakin ia mau merasionalkan kehidupannya malah semakin irasional. Paradox modernitas yang oleh Adorno dan Horkheimer disebut “Dialektika Pencerahan” itu didasari logika kerja: Rasionalisasi tindakan rasional bertujuan telah menyingkirkan pandangan dunia tradisional. Tetapi pada gilirannya rasionalisasi itu menggantinya dengan ideologi baru yang bernama teknokratisme, sebagai sesuatu yang diperlukan untuk melegitimasi proses produksi modern (kapitalisme) (Widyarsono, 1993).

Relevansi melakukan studi yang lebih mendalam tentang paradox modernitas dan mencoba mengaplikasikan hasil pemahaman tersebut ke dalam kasus konkrit perilaku kapitalisme di Indonesia era Orde Baru, didasari oleh kenyataan bahwa teori – teori modernisasi yang banyak dipelajari di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan struktural – fungsional dan sering diterapkan dengan sikap a- historis dan berpretensi obyektivistik. Pendekatan yang cenderung terkonsentrasi pada perluasan sistem - sistem birokrasi dan industrial- kapitalistik, tanpa dibarengi refleksi kritis akan menjadikan sistem – sistem tersebut lepas dari kontrol kehidupan sosial – kultural.

Mazhab Frankfurt – dan berbagai teori sosiologi skeptis – telah melakukan sebuah pendekatan kritis sosiologis sekaligus universal mengenai fenomena modernisasi, sehingga sangat relevan untuk menganalisis bentuk spesifik kapitalisme (sebagai penerapan berbagai teori modernisasi) dan implikasi rasionalitas yang mendasarinya. Meskipun ciri universalistis dari konsep

rasionalitas dikembangkan oleh ilmuwan barat, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa praxis pembangunan di Indonesiapun mengandung imperatif – imperatif rasionalitas yang universal.

L2. Rumusan Masalah

Meskipun yang menjadi sasaran teori kritis adalah masyarakat kapitalis-lanjut yang memiliki ciri *one dimentionaliti* yakni terintegrasinya semua kelas masyarakat ke dalam sistem industrial – kapitalis, sementara kondisi ini belum menggejala pada masyarakat sedang berkembang; tetapi dimensi kedua, yakni dimensi kemiskinan dan penderitaan terbuka menjadi realitas yang mencolok di negara berkembang, analisis teori kritis tetap relevan juga. Hal ini disebabkan struktur dualistik yang dianalisis teori kritis masuk juga melalui elite negara sedang berkembang (Widyarsono, 1986). Dan karena di negara – negara ini rakyat ditengarai tidak mempunyai peranan aktif – mereka hanya menjadi obyek perencanaan elite maka “kebudayaan elite” lah yang menjadi kebudayaan resmi. Melalui elite tersebut beberapa dari mekanisme yang diprihatinkan oleh teori kritis menjadi kenyataan. Maka menjadi tugas sekaligus permasalahan yang terpokok dari penelitian ini untuk menelusuri dan mengungkap:

- a. Sejauh mana dominasi rasionalias instrumental melalui perilaku birokrasi dan struktur – struktur ekonomi telah menggejala melalui berbagai kecenderungan teknokratisme dalam rangka pembangunan?
- b. Termanifestasikan dalam kasus – kasus aktual macam apa sajakah gejala irasionalitas itu dalam praxis pembangunan di Indonesia era Orde Baru?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Modernisasi Sebagai Gejala Sosial

Menurut Eisenstadt, “ berdasarkan sejarahnya, modernisasi merupakan perubahan menuju tipe sistem sosial, ekonomi dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-19 dan 20 meluas ke negara-negara Amerika Selatan, Asia dan Afrika (Eisenstadt. 1966:1). Tak ada pilihan lain bagi negara-negara maju eks penguasa kolonial di belahan Asia-Afrika dalam rangka meredam nasionalisme yang meluap dari negara-negara baru merdeka di belahan benua tersebut untuk menawarkan satu paket rekayasa sosial yang lengkap (mulai dari kerangka teoritiknya, kerangka kerja, sarana penunjang, kaum teknokrat sebagai penasehat ahli sampai bantuan modal) yang disebut proyek modernisasi negara-negara dunia ketiga.

Paket rekayasa sosial tersebut diberikan bukan tanpa maksud tertentu. Perebutan pengaruh dalam konflik ideologis Timur-Barat menjadikan paket tersebut sebagai sarana yang efektif bagi negara-negara industri maju untuk tetap mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara kapitalisme. Hegemoni tersebut sangat penting karena berkaitan dengan maju tidaknya industrialisasi di Barat sebab di negara-negara berkembanglah mereka bisa memperoleh bahan baku bagi proses industrialisasi secara murah dan mempersiapkan negara-negara berkembang tersebut sebagai pasar yang akan menyerap hasil produksinya. Di kemudian hari terbukti bahwa teori-teori itu ternyata dilatar belakangi kepentingan

masyarakat kapitalis Barat yang ingin mengeksploitasi negara sedang berkembang justru dalam kedok kemajuan negara berkembang (Sindhunata : 1983:147).

Jadi sejak awalnya modernisasi yang segera menjadi orientasi umum di negara-negara sedang berkembang, di dalamnya telah bersifat ideologis sejak mula karena memuat bias kepentingan-kepentingan tertentu. Meskipun demikian semangat untuk mencapai kemajuan telah menjadikan modernisasi sebagai keniscayaan sosial di sebagian besar masyarakat negara sedang berkembang.

Pada umumnya terdapat dua tipe modernisasi, yakni modernisasi sosial dan modernisasi ekonomi, meskipun keduanya saling mengendalikan. Modernisasi ekonomi memperoleh bentuknya pada perkembangan ekonomi yang ditandai oleh tingginya tingkat konsumsi dan standar hidup, revolusi teknologi, intensitas modal yang semakin besar dan organisasi birokrasi yang rasional. Model ini mencakup pembentukan sistem pertukaran moneter, peningkatan tingkat skill yang dibutuhkan melalui teknokrasi, mekanisasi, otomasi, akuntansi dan manajemen rasional, spesialisasi pekerjaan dan komunikasi, mobilitas tenaga kerja, distribusi barang dan jasa serta perubahan pola konsumsi. Berbagai model dikembangkan dalam tipe modernisasi ekonomi ini, misalnya Karl Bucher dengan model tiga tahapan (tahap domestik independen, perekonomian kota dan perekonomian nasional). Rostow mengembangkan lima tahapan (tahap tradisi, transisi, take-off, maturitas dan konsumsi tinggi (Francis Abraham, 1991:6-7). Asumsi yang melandasi semua teori pertumbuhan adalah adanya proses evolutif dari stagnasi ekonomi menuju konsumsi massa.

Tipe modernisasi yang kedua adalah tipe modernisasi sosial yang meliputi perubahan dalam atribut-atribut sistemik. Pola-pola kelembagaan dan peranan-peranan status dalam struktur sosial masyarakat sedang berkembang. Unsur-unsur pokoknya mencakup perubahan sosial yang terencana, sekularisme, perubahan sikap dan perilaku, revolusi pengetahuan dan komunikasi, instrumen kontraktual dalam hubungan sosial serta diferensiasi struktural. Pemikir sosial yang mengembangkan modelnya dalam tipe modernisasi sosial ini diantaranya adalah Max Weber yang menganalisis etos kerja kapitalisme dan meletakkan *Gemeinschaft* yang didasari kehendak alamiah dengan *Gesellschaft* yang didasari kemauan rasional, kepentingan pribadi dan hubungan kontraktual. Demikian juga jenis hubungan sosial, yakni mekanistik dan organik. Redfield tentang kontinuitas folk-urban, Becker dengan antitesis sekuler-suci yang memberikan acuan kerangka konseptual yang efektif bagi studi tentang dikotomi sistem-sistem nilai dalam masyarakat tradisional dan modern. Sementara Hoselitz, Lipset dan yang lainnya menggunakan variabel-variabel pola Parsonian untuk mengidentifikasi seperangkat nilai budaya yang berbeda pada masyarakat tradisional dan modern. Modernisasi sosial ditandai oleh industrialisasi, ledakan urbanisasi, sekularisasi, revolusi harapan yang meningkat, peranan media massa yang semakin besar, bangkitnya kelas menengah secara besar-besaran serta revolusi budaya yang dahsyat (Francis Abraham, 1991:7-8). Pada kenyataannya kedua tipe Modernisasi di atas saling mengandaikan, sehingga peta situasinya menjadi begitu kompleksnya.

Lebih dari itu dalam prakteknya penerapan teori modernisasi bersifat multi-faset, berbagai model pendekatan seringkali digunakan secara bersama-sama sehingga diperlukan usaha pemetaan teori yang cermat. Untuk itu dalam penelitian ini – dengan merujuk Francis Abraham (1991) – dibedakan adanya 5 model pendekatan dengan masing-masing tokohnya, yakni berturut-turut : model pendekatan Struktural (termasuk di dalamnya Smelser, Rostow, Apter, Hunter Nettle, Roberton, Marion Levy, Eisenstadt dan Huntington); model pendekatan Budaya (termasuk di dalamnya Ralph Pieris, Bellah, Ames, Gellner, Jacobs, Geertz, Hagan, Kahl dan Inkeles); model pendekatan konflik (Marx, Andre Gunder Frank, Dos Santos, Denis Goulet, Ronald Muller, James Petras, Dale Johson, Colin Leys, James Cockroft dan Pierre Jalee); dan terakhir model pendekatan Proses (Schramm, Lerner, Pye, Poll, Rogers, Doob dan Frey).

Yang patut dicermati adalah bahwa apapun tipe modernisasi dan model-model yang dikembangkan, pada umumnya di negara sedang berkembang telah dibentuk lembaga resmi perencanaan nasional (semacam Bapenas) yang menyiapkan cetak biru bagi modernisasi sosial dan ekonomi suatu bangsa. Dari berbagai kebijakan yang diterapkan dan hasil-hasil yang diperolehnya dapatlah diketahui kecenderungan teori-teori tertentu yang lebih banyak dipakai.

Untuk memahami hal tersebut, meskipun dalam penelitian ini akan digunakan berbagai catatan empirik, baik kualitatif dan terutama kuantitatif, tidak berarti penelitian ini ingin mengkaji modernisasi dan kapitalisme di Indonesia dalam bentuk kinerja teknisnya. Penelitian ini lebih bertujuan mengkaji pembangunan (modernisasi dan kapitalisme) sebagai bentuk pemikiran yang

khusus. Sebab pembangunan lebih dari sekedar suatu upaya sosio-ekonomi, ia adalah suatu persepsi yang mengkonstruksikan realitas sosial (Berger) dan menjadi mitos yang menghibur masyarakat.

Suatu mitos muncul dan tumbang, tidak tergantung semata-mata pada hasil empiris dan kesimpulan yang masuk akal, mitos muncul dan menghilang, bukan karena salah atau benar melainkan karena mengandung janji-janji atau menjadi tidak relevan.

II.2. Rasionalitas Instrumental Sebagai Dasar Modernisasi

Bersama-sama dengan Marx dan Durkheim maka Weber adalah tonggak awal yang memancarkan analisis terhadap perubahan masyarakat secara sosiologis. Arti penting Weber adalah bahwa ia melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu (subyektivitas) yang mewujudkan dalam tindakan-tindakan sosialnya dan pandangannya bahwa konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisis obyektif mengenai arti-arti subyektif yang melandasi tindakan sosial perorangan.

Weber membedakan adanya dua tindakan sosial manusia, yakni tindakan sosial rasional dan tindakan non rasional. Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan sehingga tindakan tersebut dinyatakan. Tindakan rasional dibedakan antara tindakan yang didasari rasionalitas instrumental (*zweckrationalitat*) dan tindakan yang didasari rasionalitas yang berorientasi nilai (*wertrationalitat*). Khusus mengenai rasionalitas instrumental Weber menjelaskan :

“ Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (*zweckrationalitat*) apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibatnya sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif“ (Weber, 1947:117)

Tindakan ekonomi dalam mekanisme pasar yang impersonal merupakan bentuk dasar rasionalitas instrumental ini. Tipe tindakan ini juga tercermin dalam organisasi birokratis. Modernisasi yang berkembang di masyarakat Barat adalah manifestasi dari diberlakukannya rasionalitas instrumental ini. Berbagai penemuan kreatif alat-alat dan mesin-mesin mekanis yang membawa Eropa kepada Revolusi Industri adalah didasari kemauan yang kuat dari para penemu tersebut menggunakan asas rasionalitas instrumental ini, dan bangkitnya ekonomi *laissez faire* ditengarai didasari oleh konsep maksimisasi yang berakar pada rasionalitas instrumental pula.

Konsekuensi logis lebih lanjut atas meluasnya rasionalitas instrumental di segala bidang kehidupan adalah terjadinya “ rasionalisasi “, berimbas dan teridentifikasi sebagai berikut :

1. Terjadinya perluasan-perluasan bidang sosial yang berada di bawah norma-norma pengambilan keputusan yang rasional dan
2. Terjadinya industrialisasi kerja sosial mengakibatkan norma-norma tindakan yang lain (Budi Hardiman, 1993:149). Dalam kedua kecenderungan tadi tindakan rasional bertujuan (rasionalitas instrumental) menjadi berlaku umum.

Pada akhirnya pengertian “rasionalitas” Weber telah menunjukkan efek-efek balik kemajuan teknik ilmiah terhadap kerangka kerja institusional masyarakat yang tercakup dalam pengertian modernisasi. Hal ini dilakukan Weber dengan menyusun teori mengenai perubahan institusional yang ditimbulkan oleh perluasan sistem-sistem tindakan rasional-bertujuan, seperti yang dilakukan oleh banyak sosiolog lain dengan menggunakan istilah-istilah berpasangan, misalnya *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* atau solidaritas mekanis dengan solidaritas organik.

IL3 Teori Kritis Sebagai Usaha Pencerahan

Teori kritis adalah anak dari aliran besar tradisi intelektual yang berinspirasi kepada pikiran Marx, namun yang akhirnya paling jauh meninggalkan Marx. Mereka juga sering disebut Mazhab Frankfurt (*Frankfurter Schule*) karena mereka semula bercokol pada *Institut für Sozial-forschung* di Frankfurt am Main, Jerman. Mereka menyebut sendiri cara berpikirnya sebagai “Teori Kritik Masyarakat”. Maksud teori itu adalah membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern. Yang khas dari Teori Kritik Masyarakat ini adalah bahwa mereka bertolak dari pikiran-pikiran Marx, namun sekaligus melampui dan meninggalkan dia serta menghadapi masalah-masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif (Magnis Suseno, 1992:160).

Dalam kritiknya terhadap masyarakat industri modern, mereka memulainya dari hal yang paling mendasar yakni sebagai akibat terjadinya rasionalisasi (penerapan rasionalitas instrumental) pada segenap matra

kehidupan. Krisis yang melanda masyarakat industri modern disebabkan semua tindakan sosial didasari semata-mata oleh mekanisme *mean dan needs* (mekanisme alat dan tujuan).

Usaha pencerahan yang dilakukan Teori Kritis terhadap perjalanan masyarakat modern yang mereka anggap salah arah dengan dua cara :

Pertama : dengan menelusuri kembali akar-akar munculnya pola dan cara positivistik masyarakat modern dengan merefleksikan proses rasionalisasi di dalam masyarakat Barat

Kedua : menunjukkan bahwa cara berpikir positivistik yang telah mewujudkan diri dalam sains dan teknologi berlaku sebagai ideologi (Marcuse, 1967).

Kesimpulan yang kemudian ditarik oleh Teori Kritis adalah bahwa Aufklärung telah membushkan *zweckrationalitat* sebagai sumber dari segala bentuk saintisme, positivisme, teknokratisme dan berbagai penindasan bentuk baru. Pandangan ini merupakan radikalisasi teori rasionalisasi Weber dengan mendapat banyak inspirasi dari George Lukasc tentang reifikasi (pembedaan) yang memperoleh perumusan baru (melalui Adorno dan Horkheimer) mengenai rasio instrumental yang menguasai berbagai bidang kehidupan.

Menurut Mazhab Frankfurt rasionalitas berarti adaptasi tindakan sosial pada aturan-aturan birokratis dan teknologis, sehingga rasionalisasi tidak kurang meminjam istilah Weber - *lost of freedom*. Yakni suatu proses menyeluruh yang menundukkan kekuatan-kekuatan produktif, pranata-pranata sosial, makna-makna kultural dan struktur-struktur kepribadian manusia di bawah logika tindakan

rasional bertujuan (rasionalitas instrumental). Sehingga seluruh dimensi material dan spiritual dihisap olehnya (Marcuse, 1967).

Adorno dan Horkheimer berupaya menguak fenomena modernisasi sebagai penggambaran rasionalitas instrumental yang tengah terus-menerus membebaskan diri pada pesona mitis dengan melakukan penyangkalan diri untuk kembali ke dunia makna yang ternyata tak juga dicapainya.

Bagi Marcuse, rasionalisasi Weber tidak hanya merupakan suatu proses jangka panjang perubahan struktur-struktur sosial, melainkan juga merupakan “ rasionalisasi “ dalam pengertian Freud : yang motif sebenarnya adalah mempertahankan kekuasaan yang telah usang, disembunyikan di balik dalih-dalih imperatif tindakan rasional bertujuan (Magnis Suseno, 1992). Sebab cara produksi kapitalistik yang disokong oleh teknokrasi menjadi mekanisme yang menjamin perluasan secara permanen sub sistem – sub sistem rasionalitas instrumental dalam masyarakat.

Pada gilirannya nanti pemecagan masalah dalam dialektika pencerahan atau paradox modernitas akan dilakukan oleh Habermas dengan menawarkan rasionalitas secara cerdas teori Marx ia menggali tindakan komunikatif sebagai dimensi kedua yang melengkapi tindakan instrumental sebagai dimensi pertama. Dalam konteks yang lebih luas rasionalitas komunikatif tampil dan berkembang dalam argumentasi-argumentasi rasional untuk mencapai konsensus intersubjektif dan akhirnya tiba pada kesadaran bersama bahwa modernisasi seharusnya merupakan perwujudan dari rasionalitas komunikatif.

II.4 Krisis Dalam Masyarakat Modern

Untuk mencari relevansi analisis Teori Kritis dengan krisis ekonomi yang saat ini melanda sebagian negara-negara sedang berkembang, di bawah ini diuraikan secara sekilas persepsi Teori Kritis terhadap krisis yang ada dalam masyarakat teknokratis.

Yakni bahwa paradox modernitas akan membawa masyarakat pada munculnya berbagai krisis. Pengertian krisis itu sendiri bagi Habermas memiliki pengertian ganda atau memiliki dua sisi. Sebagai fenomena internal dan eksternal. Krisis eksternal – misalnya krisis ekonomi – adalah belum merupakan krisis yang sesungguhnya, karena hanya merupakan gangguan disfungsional yang bisa diatasi dengan manajemen krisis.

Krisis yang sesungguhnya adalah krisis internal, yang akan terjadi kalau krisis itu dialami oleh para individu sebagai sesuatu yang mengancam identitas dan eksistensi sosial mereka dalam hubungannya dengan nilai-nilai, norma-norma dan makna-makna kultural. Krisis yang sesungguhnya terjadi kalau krisis dalam sistem industrial kapitalis menjadi krisis identitas yang mengancam bukan hanya integrasi sistem tetapi juga integrasi sosial (problema semacam ini dalam derajat tertentu telah terjadi di Indonesia pada saat proposal penelitian ini disusun).

Berdasarkan pemahaman di atas, Habermas menganalisis beberapa data empiris yang berhubungan dengan modernitas kapitalis di negara-negara teknokratis. Penyebab krisis dicirikan oleh mula-mula adanya intervensi yang berlebihan dari negara kedalam kehidupan masyarakat sipil. Karena dalam konteks masyarakat teknokratis negara bertugas mengatasi disfungsionalitas-

disfungsionalitas sistemik, yang dengan cara itu negara mendapatkan legitimasi teknokrasinya. Untuk mempertahankan legitimasinya tersebut negara modern mengendalikan loyalitas massa, sehingga negara melakukan intervensi terus-meneurs ke dalam kehidupan masyarakat sipil atas nama “rasionalitas instrumental”.

Negara yang selalu mengintervensi rakyatnya tidak akan selalu mampu menanggulangi krisis eksternal, misalnya krisis ekonomi, laju inflasi yang meningkat yang disebabkan merosotnya nilai tukar mata uang. Krisis ekonomi tadi akan menjalar ke bidang administratif birokrasi, menjadi krisis administratif. Karena pembenahan administratif dalam berbagai bentuknya seperti regulasi dan semacamnya pada gilirannya tidak berhasil memberikan performance untuk meraih loyalitas massa yang diinginkan sebagai sumber legitimasi, oleh sebab itu krisis terus berlangsung sehingga bermuara pada terjadinya krisis legitimasi. Karena legitimasi diperoleh dari makna-makna yang memotivasi tindakan sosial individu, maka ketika loyalitas menurun terjadilah krisis motivasi. Ketika motivasi tidak lagi dimiliki rakyat terjadilah krisis yang sesungguhnya yakni krisis internal.

Dari analisis itu bisa dipahami bahwa modernitas kapitalis tidak akan selamanya memperoleh dukungan rakyat karena potensi krisis yang ada di dalamnya. Sedangkan peta krisis pada masyarakat modern menurut Habermas sebagai berikut :

Komponen Struktur	Kebudayaan	Masyarakat	Kepribadian
Gangguan pada :			
Reproduksi Kultural	Hilangnya Makna	Krisis Legitimasi	Krisis Orientasi
Integritas Sosial	Rasa ketidakpastian akan didentifikasi kolektif	Anomie	Alienasi
Sosialisasi	Keterputusan dengan tradisi	Krisis Motivasi	Psikopatologi

Dengan diagnosisnya mengenai patologi-patologi dalam masyarakat teknokratis. Habermas berhasil menyaturagikan dimensi psikologis dan kultural dari krisis sosial ke dalam Teori Krisis (Budi Hardiman, 1993:147).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian

1. Jika selama ini diskursus teori krisis di Indonesia masih dalam takaran akademis atau hanya muncul dalam forum-forum ilmiah dan cenderung menjadi bagian dari "*the rational world*" sementara pembangunan sebagai praktek modernisasi sudah begitu menyentuh kehidupan sehari-hari sehingga menjadi "*the real world*" maka penelitian ini dimaksudkan untuk mempersatukan kedua dimensi tersebut. Konsekuensi logis yang diharapkan adalah *the real world* memperoleh refleksinya sehingga tidak lagi bersifat a-historis, sementara "*the real world*" menemukan bumi tempat berpijaknya.
2. Dominasi ilmu ekonomi dalam studi pembangunan dan penerapannya di Indonesia selama ini sulit dibantah. Kondisi tersebut bahkan sudah mengarah pada apa yang disebut Gary Becker (1990) sebagai "imperialisme ekonomi" yakni penjarahan bidang-bidang disiplin ilmu sosial yang lain oleh ilmu ekonomi yang mengaku sebagai "*the queen of social sciences*". Sejak 30 tahun terakhir para ekonomi menjadikan dirinya sebagai "master" utama pembangunan nasional dengan meninggalkan sosiolog dan ilmuwan bidang lainnya karena dianggap lebih banyak mengganggu daripada membantu. Tetapi krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam dua tahun terakhir ini membuktikan ketidakmampuan para ekonom dengan arogansi keilmuannya untuk menjelaskan sekaligus mencari solusi guna mengatasi krisis ekonomi

semata-mata menggunakan hukum-hukum ekonomi (berbagai tindakan rasional di bidang ekonomi telah diterapkan, tetapi nilai dolar justru semakin membumbung tinggi sampai pada tingkat yang tak masuk akal). Bahkan ketika krisis mencapai puncaknya pada awal 1998 ditengarai adanya “ *the death of economics* “. Ternyata pendekatan kritis (yang menjadi dasar logika gerakan reformasi) dan pendekatan yang multi-disipliner terbukti lebih mampu mengatasi keadaan. Berdasarkan situasi di atas maka studi dan penggalian konsep-konsep sosiologis kritis ini menemukan arti pentingnya untuk menggugat “ imperialisme ekonomi “ yang terjadi selama ini. Sekaligus dengan itu hasil penelitian ini diharapkan mampu mendudukan kembali fungsi dan peranan sosiologi pada tempat yang seharusnya dalam studi pembangunan di Indonesia.

3. Melalui pendekatan kritis dalam penelitian ini hendak dibongkar mitos-mitos pembangunan dan irasionalitas yang ada di dalamnya. Dengan terbongkarnya mitos-mitos dalam pembangunanisme tersebut diharapkan diperoleh percik-percik pemikiran untuk “ urun rembug “ dalam rangka mengembalikan arah pembangunan ke ” rel “ yang seharusnya, yakni sebagai usaha pemanusiaan manusia.
4. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa akar pemikiran atau “ ideologi tersembunyi “ yang mendasar teori modernisasi adalah kapitalisme-liberalisme untuk itu menjadi hal yang menarik untuk mengkaji penerapan modernisasi di Indonesia dihubungkan dengan model kapitalisme yang kemudian muncul. Sejauh mana model yang lebih spesifik dari kapitalisme tersebut relevan

dengan semangat modernisasi yang mengutamakan efisiensi dan profesionalisme subyeknya.

III.2. Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini tidak bermaksud menolak modernisasi melainkan melakukan re-interpretasi berdasarkan pendekatan kritis terhadap asumsi-asumsi dasar yang melandasinya dan melakukan refleksi terhadap perilaku kapitalisme yang merupakan wujud konkrit modernisasi. Sebab seperti halnya keyakinan Habermas bahwa proyek modernisasi bukanlah suatu upaya yang gagal (sehingga perlu diganti seperti diasumsikan aliran Post Modernisme) melainkan sebuah proses yang mengalami stagnasi atau salah arah (terdistorsi) dan oleh sebab itu perlu dilakukan pencerahan.

Relevan dengan hal itu kontribusi yang diberikan hasil penelitian ini adalah ikut meluruskan arah pembangunan dengan menunjukkan sasaran-sasaran baru. Jika selama ini tugas ilmu ekonomi adalah menentukan sarana-sarana yang diperlukan dalam pembangunan maka tugas sosiologi adalah merumuskan sasaran-sasaran yang semestinya dicapai oleh proyek modernisasi. Dengan meminjam istilah Habermas pembangunan di Indonesia memerlukan pencerahan.

Kontribusi selanjutnya yang bisa diberikan melalui penelitian ini adalah : Dengan memahami kapitalisme sebagai dasar modernisasi, akan diketahui cocok atau tidaknya model kapitalisme yang muncul di Indonesia dengan asumsi dasar dan tujuan umum modernisasi. Selanjutnya hasil analisis sosiologis kritis khususnya Habermas tentang patologi-patologi yang ada dalam masyarakat

modern kapitalistik dapat menjadi bahan studi yang subur untuk membantu menemukan arah bagi perkembangan masyarakat. Berbagai krisis yang melanda negara modern sejauh mungkin akan bisa dihindarkan agar negara-negara berkembang yang tengah melakukan modernisasi tidak terjebak pada kesalahan yang sama.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya adalah analisis kontekstual terhadap situasi zaman ini dengan menggunakan pisau analisis yang telah tersedia dalam wacana ilmiah sosiologi.

Pada awalnya penelitian ini berangkat dari ketertarikan kepada ide yang dilontarkan oleh C. Wright Mills dalam bukunya *Sociological Imagination* (1959) bahwa sosiologi seharusnya tidak hanya menerima fakta-fakta tetapi menafsirkan kembali makna dan nilai fakta-fakta yang dianalisisnya. Sosiolog baru mampu melihat bagaimana struktur suatu masyarakat berkaitan dengan keseluruhan perubahan lebih luas yang sedang terjadi. Ilmu-ilmu sosial harus bisa meraba keresahan dan harapan macam apa yang terjadi dan timbul dari masalah itu.

Menurut Denis H. Wrong (1977) gagasan C. Wright Mills di atas searus dengan gagasan Daniel Bell, Peter Berger dan Mazhab Frankfurt. Para sosiolog tersebut menurut Magnis Suseno ingin agar sosiologi menceburkan diri dalam persoalan dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan tidak hanya membatasi diri pada analisis teknis belaka tentang masyarakat. Mereka ingin agar sosiologi juga bisa menganjurkan perubahan masyarakat (Magnis dalam Sindhunata, 1982).

Penelitian ini berpijak pada asumsi sosiologi ekonomi bahwa kriteria dan pertimbangan ekonomi selalu melekat (*embedded*) dalam tindakan sosial individu atau kelompok masyarakat, sekaligus juga didasari oleh asumsi sosiologi

budaya yang melihat kapitalisme sebagai wujud konkrit modernisasi adalah suatu kultur yang dibentuk sekaligus membentuk struktur sosial atau dengan merujuk Berger realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial.

Oleh sebab itu penelitian ini meskipun mengangkat isu-isu yang bersifat teknis ekonomis tetapi lebih menekankan interpretasi historis tentang sesuatu yang mempengaruhi kultur dan menyusun struktur sosial dalam bidang Hermeneutika pendekatan ini bisa digolongkan sebagai pendekatan re-kontekstualisasi suatu proses historis atau sebagai usaha memberi *sitz in Leben*.

Data diperoleh melalui tiga jalan :

1. Penelusuran informasi ilmiah
2. Observasi langsung atas kondisi obyektif masyarakat dewasa ini dan
3. Melakukan konfirmasi dengan *key person* yang dianggap menguasai permasalahan yang dibahas.

Langkah-langkah metodis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Pertama : melakukan deskripsi terhadap status masalah sehingga menjadi jelas apa yang menjadi subyek penelitian, sasaran penelitian, perumusan permasalahan, hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama penelitian berlangsung serta menyusun struktur dan kerangka analisis. Dalam penyusunan kerangka analisis dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap luas ruang lingkup penelitian di samping menyaring kerangka teoritik yang paling relevan dengan masalah yang hendak diteliti (membatasi jangkauan penelitian)

- Kedua** : melakukan penjaringan data dari berbagai wacana tertulis yang mencerminkan situasi aktual dan wacana publik menjelang runtuhnya pemerintahan Soeharto (Orde Baru)
- Ketiga** : melakukan identifikasi data yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikannya secara katagorial dan mengklarifikasinya (menjelaskan), kemudian menginterpretasikannya dan mencari koherensinya dengan kerangka analisis yang telah disusun.
- Keempat** : data yang telah disusun dianalisis dan diinterpretasikan (berdasarkan metode *Verstehen*) untuk kemudian dideskripsikan sebagai laporan penelitian.

Di samping langkah-langkah di atas sejak awal penelitian dilakukan sampai laporan penelitian disusun, dilakukan langkah metodis yang disebut Koherensi Intern dan Heuristika. Dengan koherensi intern dimaksudkan sebagai usaha untuk memahami unsur-unsur obyek penelitian dalam kerangka internal structure dan external relation-nya (Bakker, 1986). Sedangkan dengan Heuristika (Peursen, 1988) dimaksudkan agar selama penelitian dilakukan dapat ditemukan hal-hal baru sebagai hasil penelitian. Faktor Heuristika inilah yang diharapkan akan memberi ciri-ciri argumentatif hasil akhir penelitian ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Keberhasilan Pembangunan Orde Baru

Negara Orde Baru (NOB) bersama beberapa negara di Asia yang lain merupakan fenomena sosial-ekonomi-politik yang menarik dan menjadi bahan kajian banyak intelektual yang menggeluti studi pembangunan. Berbeda dengan negara-negara Barat yang menggunakan proses demokrasi di bidang sosial-politik dan ekonomi dalam memajukan negaranya yakni dengan lebih mengedepankan otonomi manusia sesuai semangat *Renaissance* dan *Aufklarung* untuk melawan otoritarianisme-feudalisme beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, justru menggunakan cara-cara birokratis-otoriter dan cenderung anti demokrasi dalam menerapkan pembangunan sebagai wujud keinginan menjadi negara modern.

Antara tahun 70-an hingga pertengahan 90-an terjadi pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan dari negara-negara yang disebut sebagai “ macan asia” dan fenomena ini bagi pengamat Barat sering disebut sebagai “ *the Asian Miracle* “. Di Indonesia sendiri tercatat beberapa keberhasilan yang dicapai pemerintah Orde Baru dalam pembangunan ekonomi khususnya. Pertama adalah keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam menciptakan swa-sembada pangan (beras). Keberhasilan ini penting untuk dicatat jika dibandingkan dengan pernah terjadinya antrian panjang pembelian beras murah pada masa Orde sebelumnya, sebab pemerintah pada waktu itu belum mampu menyediakan pangan yang memadai bagi rakyat. Keberhasilan ini juga memiliki arti penting sebab

berkorelasi dengan kemampuan menjaga stabilitas politik mengingat kurang tersedianya pangan seringkali menjadi pemicu terjadinya keresahan sosial.

Keberhasilan kedua yang dicapai rezim Orde Baru adalah pada semakin meluasnya akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Usaha yang dilakukan sejak Pelita II telah cukup membuahkan hasil pada akhir Pelita V, sekurang-kurangnya secara kuantitatif dengan semakin menurunnya angka kematian bayi dan semakin meningkatnya warga yang bebas dari buta huruf. Secara empiris juga dirasakan keberadaan Puskesmas di setiap kecamatan, posyandu di setiap desa / kelurahan dan semakin banyaknya SD Inpres di seluruh pelosok wilayah Indonesia seiring dengan diintrodukirnya program Wajib Belajar bagi anak usia sekolah.

Sedangkan keberhasilan ketiga adalah di bidang kependudukan yang menyangkut kemampuan pemerintah Orde Baru menurunkan jumlah penduduk miskin, yakni yang semula pada awal 1970 tercatat 70 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan menjadi hanya 25 juta pada akhir 1995.

Pendekatan pragmatis dalam penerapan teori modernisasi oleh rezim Orde Baru selama 30 tahun di bidang ekonomi juga telah menunjukkan hasil empiris yang cukup berhasil.

Kebangkrutan ekonomi nasional yang diwariskan pemerintahan Soekarno telah berhasil diatasi, tingkat laju inflasi bisa ditekan hingga dua digit. Ekonomi nasional sejak awal 70-an dibangun dengan bantuan besar-besaran dari negara-negara maju (Barat) dan dibukanya lebar-lebar pintu bagi masuknya modal asing yang menandai Indonesia merujuk Berger menempuh “ jalan kapitalisme “.

Industri dan sektor dunia usaha digenjot secara pesat sehingga, khususnya dalam penciptaan infrastruktur perekonomian Indonesia secara makro, perekonomian nasional melesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4-6% pertahun.

Fenomena keberhasilan pertumbuhan ekonomi dari kondisi inflasi 500% di akhir tahun 60-an menjadi kurang dari 10% rata-rata pada tahun 80-an tentu tak lepas dari berbagai trik, strategi dan manajemen modernisasi yang diterapkan. Beberapa teori modernisasi yang diadopsi lebih merujuk pada model pertumbuhan ekonomi berdasarkan paradigma ekonomi neo-klasik. Beberapa model tersebut diantaranya adalah model yang diformulasikan oleh Arthur Lewis yaitu model pembangunan dalam situasi adanya surplus tenaga kerja, model lima tahapan dari Rostow, model dorongan gencar (*big push*) dari Rosenstein Rodan, model pertumbuhan yang tak seimbang (*unbalanced growth*) oleh Hirschman dan model lingkaran tak berujung (*vicious circle*) dari Nurkse (Sritua Arief, 1995).

Model-model ini menumpukan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan dalam pengertian memaksimalkan produk nasional dimana faktor sentral dalam proses menuju pencapaian tujuan pembangunan adalah faktor modal. Berbagai formulasi yang dirujuk ini sama sekali tidak mempertimbangkan masalah-masalah sosial seperti penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, distribusi pendapatan dalam proses produksi. Kerangka teoritis yang dikemukakan tidak mempertimbangkan aspek kelembagaan dan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang eksogen. Di dalam masyarakat akan terjadi suatu proses yang harmonis yang akan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh strata masyarakat melalui apa yang dikenal sebagai mekanisme tetesan ke bawah (*trickel-down*

mechanism). Jika sebagian masyarakat berhasil berkembang ekonominya dan mencapai kesejahteraan yang cukup tinggi maka dengan sendirinya perkembangan ekonomi dan kesejahteraan ini akan menyebar dan menetes kepada bagian masyarakat yang lebih luas.

Kepercayaan yang berlebihan terhadap mekanisme efek menetes ke bawah tersebut memacu pemerintah Orde Baru untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi arus masuk modal asing dan mendorong sektor swasta dalam negeri untuk mengembangkan berbagai usaha skala besar dengan memberikan berbagai kemudahan baik dalam hal modal maupun perijinan. Karena pada awal 70-an lapisan masyarakat, yang secara historis, memang sudah siap dengan dunia bisnis adalah kaum golongan pengusaha golongan Cina, maka terjadilah kolaborasi antara sekelompok pengusaha Cina yang bertindak sebagai pelaku pasar, kelompok birokrasi yang mempermudah gerak bisnis kelompok pertama dan militer yang bertugas mengatasi gejolak sosial yang potensial mengganggu stabilitas keamanan yang merupakan pra syarat utama masuknya modal asing. Hasilnya adalah tumbuhnya perekonomian nasional secara makro yang ditopang oleh gejala konglomerasi, yakni terpusatnya berbagai bidang dan sektor usaha di tangan segelintir pengusaha yang memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah. Tercatat hanya sekitar 30 keluarga berhasil menguasai 70% kekayaan nasional yang berwujud pangsa pasar, permodalan dan aset-aset produktif nasional. Keadaan ini mulai pertengahan 80-an yang pada mulanya dirasakan oleh masyarakat luas sebagai ketidakadilan ekonomi semakin dirasakan pula sebagai dampak ikutan gejala konglomerasi menjadi ketidakadilan di bidang sosial. Hal

ini nampak dari semakin meningkatnya “ biaya sosial “ (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, misalnya munculnya *high cost economy*, rusaknya lingkungan, semakin melebarnya kesenjangan kaya-miskin (*vicious dualism*) dan munculnya praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sementara dalam rangka mempertahankan paradigma pertumbuhan yang kemudian terbukti gagal hak-hak politik rakyat dimarginalisasikan (dicabut dan diberangus) demi tetap terjaganya stabilitas nasional atau arti kata yang lain demi tetap berputarnya roda produksi industrialisasi.

Berbagai kritik tajam atas praktek pembangunan di negara berkembang banyak dilontarkan baik oleh para analis/teoritisi maupun para praktisi pembangunan di berbagai lembaga internasional (IMF, Worldbank, ILO, Unicef) dan berbagai NGO luar negeri maupun LSM di dalam negeri. Kritik ini tercermin dari berbagai tulisan tentang studi pembangunan dari Myrdal (1973), Seers (1969), dan Stewart (1985). Mereka menganjurkan masalah pembangunan di negara berkembang hendaklah dianalisis dalam dimensi yang lebih luas dengan mengikutsertakan disiplin-disiplin ilmu sosial yang lain utamanya sosiologi, antropologi, sejarah dan ilmu politik. Berseiring dengan ini tolak ukur pembangunan hendaknya bukan hanya ditunjukkan oleh Produk National Bruto per kapita, tetapi juga didasarkan oleh tiga kriteria yang lain yakni : berkurangnya kemiskinan absolut, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan dan mengecilnya tingkat pengangguran (Seers, 1979). Internasional Labour Organization (ILO) pada 1976 memperkenalkan konsep kebutuhan dasar manusia setelah melihat kenyataan empirik bahwa proses pembangunan di dunia

ketiga tidak menyentuh kelompok 40% terbawah dari jumlah penduduknya bahkan malah memperhebat kesenjangan kaya miskin. Denis Goulet (1971) menyodorkan konsep tentang harga diri dan kebebasan sebagai nilai inti (*core values*) pembangunan. Harga diri akan menimbulkan respek antara masing-masing warga dan antara bangsa yang satu dengan yang lain sedangkan kebebasan menyangkut kebebasan dari ketakutan, kebebasan bersuara, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan dan bebas dari ketergantungan baik antar warga dan terutama antara bangsa yang satu dengan yang lain. Guolet lebih menekankan pentingnya makna kerjasama.

Berbagai kritik atas pembangunan tersebut bukannya tidak ditanggapi oleh penguasa di negara berkembang. Terdapat sebagian (besar) elite yang memang memandang kritik atau perbedaan pendapat sebagai penghalang eksistensi mereka sebagai “ kelompok yang mengatur “ sehingga memperlakukan perbedaan pendapat tersebut sebagai subversi dan bukannya sebagai suatu cara masyarakat memastikan pertimbangan yang paling mungkin dari serangkaian panjang pilihan kebijakan. Tetapi tetap terdapat sebagian teknokrat di Indonesia yang masih menggunakan akal sehatnya dan mencoba merivisi arah pembangunan, misalnya dengan mengadopsi konsep kebutuhan dasar dalam konsep KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) dan UMR (Upah Minimum Regional) serta melalui program pengentasan kemiskinan (IDT atau Inpres Desa Tertinggal) dan berbagai program-program yang lain. Sebagian program ini cukup efektif tetapi lebih banyak program yang tak mencapai sasaran dan tidak mengubah konstelasi perekonomian nasional yang ada sebab berbagai *vested interest* yang terlanjur

menggurita seiring dengan terlalu lamanya kekuasaan dipegang oleh kelompok kepentingan tertentu telah menciptakan mentalitas kolektif yang tak sesuai dengan tuntutan modernisasi. Hal yang terakhir ini bisa dipahami dengan jelas berdasarkan analisis struktural dari Prebisch dan Eurtado menjelang pertengahan 90-an.

Menurut Prebisch dan Eurtado proses akumulasi ekonomi dan perubahan sosial ekonomi di negara berkembang yang notabene adalah negara bekas jajahan dimulai karena pengaruh eksternal dari negara-negara kapitalis yang menjajah, yakni dengan diintrodusirnya sektor ekspor bahan-bahan mentah dalam struktur ekonomi negara-negara jajahan yang khusus diciptakan untuk menopang ekspansi sektor industri di Barat. Pada saat terjadi krisis ekonomi di negara-negara penjajah pada abad ke-19, sektor ekspor bahan-bahan mentah dari negeri-negeri jajahan telah dijadikan sebagai salah satu komponen untuk memecahkan masalah krisis ekonomi tersebut.

Mengingat pentingnya sektor ekspor ini maka kemudian diatur sedemikian rupa agar sangat menguntungkan untuk garapan investasi modal asing yang salah satunya adalah dengan menekan upah buruh agar biaya modal tetap bisa diminimalkan. Sementara itu di sektor ekonomi rakyat terjado proses penentuan harga yang monopsonistik terhadap komoditi yang dihasilkan rakyat dan di lain pihak terjadi pula proses penentuan harga yang bersifat sepihak terhadap barang-barang yang dibutuhkan rakyat. Keseluruhan proses pertukaran ini menunjukkan hubungan ekonomi yang dialektis dan bersifat eksploitatif. Dalam keseluruhan sistem ekonomi di negeri jajahan dan bersifat menerus ketika berstatus sebagai

bekas jajahan, akhirnya membentuk pola distribusi pendapatan dan pola distribusi penguasaan sumber-sumber ekonomi yang sangat timpang. Struktur masyarakat terdiri dari sekelompok kecil penduduk yang berpendapatan tinggi dan massa rakyat yang miskin. Kelompok kecil penduduk berpenghasilan tinggi ini sadar atau tidak sadar merupakan kelas komprador yang melakukan kegiatan untuk pihak asing. Pemikiran neo-strukturalis selanjutnya menyebutkan bahwa intervensi pemerintah ternyata tidak menjamin berlangsungnya suatu proses pembangunan yang dinamis untuk masyarakat luas, sebab dalam tubuh pemerintah telah berkembang suatu mentalitas yang destruktif dengan mendistorsi harga sebagai akibat meluasnya hak-hak istimewa (*privileges*) kepada kelompok ekonomi tertentu. Pemberian hak-hak istimewa ini kemudian menimbulkan terbentuknya konsentrasi ekonomi di tangan sekelompok orang yang dengan kekuasaan ekonomi, bekerjasama dengan klik-klik politik tertentu menjelma menjadi monopolis-monopolis dan oligopolis-oligopolis. Pembentukan harga komoditas berlangsung dalam suasana ketidaksempurnaan pasar yang luar biasa.

Akibat pemberian hak-hak istimewa maka melembagalah mentalitas pengusaha yang lebih menginginkan terus hidup dari rente ekonomi. Aktor-aktor ekonomi yang meresapi rentier mentality ini tidak merupakan kelas pengusaha yang tangguh. Mereka inilah yang merupakan pendukung struktur kekuasaan yang telah menyuburkan kesempatan mereka untuk meraih rente ekonomi secara leluasa. Maka tidak mengherankan jika rezim Orde Baru mampu berkuasa selama seperempat abad lebih sebab para " kapitalis rente " di sekitar elite penguasa akan berusaha semaksimal mungkin agar patron-patron mereka tetap berkuasa sebab

menyangkut kelangsungan hidup bisnis mereka, salah satu usaha mereka adalah memberikan dukungan finansial yang sangat besar kepada partai yang berkuasa khususnya setiap masa kampanye.

Kemampuan rezim Orde Baru untuk tetap mampu mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari seperempat abad dalam pandangan Nasikun (1998) sekurang-kurangnya berakar pada empat sumber utama, yakni :

Pertama : klientelisme ekonomi yang berhasil dilakukan berkat melimpahnya sumber daya ekonomi dari “ boom “ minyak pertengahan 70-an dan dengan menguras sumber daya alam seperti tambang emas, tembaga dan aluminium (PT. Freeport) di Irian dan pulau-pulau lainnya serta terkurasnya hasil hutan di sebagian besar hutan Kalimantan.

Kedua : keleluasaan rezim Orde Baru menggunakan mekanisme kekerasan, kekerasan militer maupun kekerasan hukum. Besarnya kekuasaan militer di semua lini kehidupan dan dibentuknya lembaga-lembaga militer non-reguler seperti Opsus dan Kopkamtib semakin mempermudah penguasa untuk mengatur ketakutan rakyat demi menuntut loyalitas. Kekerasan militeristik ini ditopang dengan kekerasan hukum yang dikendalikan melalui peradilan yang dikontrol pemerintah.

Ketiga : melalui politik bahasa dilakukan ideologisasi definisi partikularistik terhadap segala kehidupan bernegara untuk melegitimasi otoritarianismenya. Definisi yang bersifat sepihak demi kepentingan penguasa ini menyangkut diantaranya definisi tentang demokrasi

Pancasila, hak asasi manusia, tanggung jawab warga negara (“ mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi) dan lain-lain yang telah membangun legitimasi politik rezim Orde Baru secara moral. Legitimasi ini diperoleh dengan mempermainkan standar moralitas dan bukannya memperbaiki diri untuk memenuhi standar moralitas tertentu yang secara universal berlaku. Lebih jauh lagi penggunaan politik bahasa ini sebagai instrumen penghalusan tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kedaulatan rakyat dan stigmatisasi terhadap tindakan-tindakan rakyat yang dianggap sebagai perlawanan terhadap kebijakan dan kekuasaan pemerintah.

Keempat : adanya jaringan korporatisme negara yang “ menyalurkan “ (memanipulasi dan mengendalikan) partisipasi masyarakat menjadi mobilisasi politik yang terkontrol. Korporatisme pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya untuk menekan pertentangan-pertentangan kelas atau kelompok-kelompok kepentingan melalui pembentukan organisasi korporatik yang memiliki dua tujuan : untuk memelihara harmoni antara penguasa dan massa rakyat dan untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan penguasa memiliki pengaruh langsung dan besar dalam proses politik.

Kekuasaan yang sentralistik, hegemonik dan nyaris tak tersentuh oleh kritik bahkan cenderung reaksioner terhadap kritik, telah membentuk karakter politik yang otoritarian dan manakala menjadi patron bagi kelompok pelaku

ekonomi tertentu menciptakan suatu model ekonomi yang khas yang sering disebut oleh sementara pengamat sebagai kapitalisme semu (*ersatz kapitalisme*) (Kunio, 1988), kapitalisme rente (*rent kapitalism*) (Tornquist, 1990) dan dalam diskursus yang terbaru disebut sebagai kapitalisme perkoncoan (*crony kapitalism*), yang mengawinkan watak-watak paling dasar dari dua sistem ekonomi yang dalam analisis Marx merupakan dua tahap dari perkembangan suatu masyarakat, yakni : sistem kapitalisme dan feodalisme (Nasikun, 1998 : 4). Sisi gelap yang merupakan watak umum kapitalisme muncul berupa kecenderungannya untuk terus melakukan eksploitasi, akumulasi dan ekspansi kapital di atas kesenjangan bangunan struktur pemilikan alat-alat produksi dan distribusi pendapatan. Sementara feodalisme menyumbangkan sifat otoriter, paternalistik dan kecenderungan untuk melakukan dominasi. Perkawinan kedua sistem ini berarti pula perkawinan antara kekuatan kapital dengan kekuatan politik.

Dengan demikian sistem ekonomi yang muncul bukan kapitalisme yang mengikuti hukum-hukum pasar bebas melainkan kecenderungan kapitalisme yang terdistorsi atau dikendalikan kekuasaan yang terkonsentrasi di antara kelompok (klik-klik) militer, kaum teknokrat yang cenderung menjadi “ kapitalis birokrat “ dan kelompok pengusaha oligopolistik yang secara bersama-sama dengan restu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat bisnis internasional (kapitalisme global : baik yang merupakan swasta murni seperti MNC (*multi national corporation*) maupun lembaga-lembaga internasional yang merupakan

kepanjangan tangan dari kepentingan negara-negara industri maju seperti IMF, World Bank, APEC, GATT dan sebagainya).

V.2. Irasionalisasi Dalam Modernisasi Orde Baru

Jika pembangunan adalah suatu usaha manusia secara rasional untuk keluar dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan terhadap sesuatu di luar dirinya, maka ketika pembangunan menjadi sebuah ideologi yang bersifat memaksa dan menundukkan segala hak-hak dan kepentingan individu maka dengan sendirinya usaha untuk membangun tadi menjadi irasional. Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan dan menafikan biaya-biaya sosial yang muncul dengan sendirinya justru merupakan proses pembodohan, pemiskinan dan menciptakan ketergantungan yang lebih besar lagi dari individu kepada suatu institusi yang bernama : negara.

Terjadi pembodohan karena warga negara tidak lagi mampu (karena tidak lagi boleh) menggunakan nalarnya sendiri untuk menentukan apa-apa yang menjadi kebutuhannya secara mandiri. Semua yang dibutuhkan warga negara baik fisik maupun non-fisik (misalnya kebebasan) seolah-olah sudah tercakup dalam berbagai program yang ditawarkan dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek yang telah ditentukan secara sepihak oleh negara. Para teknokrat menyusun program dan melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) ibarat dokter ahli bedah yang tengah bekerja pada tubuh pasiennya yang tengah tak sadarkan diri.

Pembodohan juga bisa berarti pula hilangnya “ kearifan lokal “ (*local genius*). Misalnya di bidang pengobatan penyakit dan di bidang budi daya

tanaman pertanian. Bisa pula berupa hilangnya akar-akar budaya lokal sehingga warga yang dimodernkan mengalami alienasi dan anomie karena tidak bisa mengadaptasikan dirinya dengan alam kebudayaan modern.

Selanjutnya seiring dengan proses modernisasi yang membawa nilai-nilai baru baik di bidang sosial maupun ekonomi, maka tolak ukur (standar penilaian) terhadap banyak hal juga berubah. Kriteria miskin atau kaya, berkecukupan atau kekurangan juga cenderung berubah seiring munculnya gaya hidup dan perubahan berbagai tolok ukur mengenai kehidupan khususnya dari segi material. Kemiskinan secara kultural jadi bersifat relatif. Bisa jadi meskipun telah dilakukan berbagai proyek pembangunan di suatu komunitas yang muncul hasilnya adalah orang-orang yang merasa lebih miskin jika digunakan kriteria yang baru.

Terjadinya ketergantungan karena warga negara tidak lagi punya pilihan bebas untuk menentukan berbagai hal yang menjadi prioritasnya. Semua pilihan dalam hampir semua segi kehidupan (pilihan politik, cita rasa dan apresiasi budaya, pemenuhan kebutuhan pokok, jumlah kepemilikan anak bahkan sampai pada pilihan alat kontrasepsi) telah diatur sedemikian rupa oleh berbagai peraturan perundang-undangan maupun penentuan kriteria dan harga-harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kebebasan untuk memilih telah dikerangkeng oleh berbagai aturan yang tak boleh ditolak rakyat.

Jika maksud baik dari pembangunanisme adalah mengupayakan pilihan-pilihan yang paling rasional bagi warga negara berdasarkan logika “ maximisasi “ dan skala prioritas berdasarkan mekanisme “ mean and ends “ maka dengan

merujuk Weber penciptaan pilihan-pilihan yang didasari oleh rasio instrumental tersebut akan menjadi kerangkeng besi (*irons cage*) bagi warganya. Sebab seperti yang dikatakan para pemikir Mazhab Frankfurt : rasionalisasi berarti adaptasi secara terpaksa perilaku warga pada aturan birokratis dan teknologis dari sistem teknokratis. Dengan demikian pembangunanisme mengakibatkan *lost of freedom*, yakni proses menyeluruh yang menundukkan kekuatan-kekuatan produktif, pranata-pranata sosial, makna-makna kultural dan struktur-struktur kepribadian manusia di bawah aturan-aturan yang semata-mata didasari rasionalitas instrumental.

Gejala yang begitu kasat mata yang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru, misalnya birokrasi telah muncul sebagai kelompok masyarakat berseragam pegawai yang tidak melayani masyarakat akan tetapi sebagai penguasa yang “ mengutip “ uang rakyat sambil tetap menampilkan dirinya sebagai sosok yang arogan karena merasa berhak. Birokrasi yang merupakan representansi aparatur negara menjadi bagian terdepan dari penampilan yang tidak punya sensitifitas terhadap rakyat. Mereka adalah kelompok yang paling tidak mampu berbeda pendapat serta di tangan mereka ideologi bangsa menjadi ideologi kelompok sementara sebaliknya konsep pembangunan yang merupakan konsep kelompok elite dijadikan sebagai ideologi bangsa, yakni sebagai pembangunanisme. Pembangunan yang bermula adalah sebuah konsep dengan banyak pilihan dijadikan ideologi tunggal yang menindas pikiran kreatif dan tindakan yang berbeda dengan konsep itu. Lebih parah lagi, ideologi nasional yang mestinya

menjadi payung bagi kegiatan bernegara dijadikan perisai dan alat pemukul bagi orang-orang yang berbeda pendapat tersebut.

Berbagai kasus aktual lain yang menunjukkan kepada kita bahwa pembangunanisme yang menjadi bersifat ideologis akan membawa kita ke situasi yang paradoxal, antara lain : kebebasan untuk berekspresi telah dikurung oleh lembaga perijinan sedemikian rupa sehingga koridor lembaga perijinan menjadi kawat berduri yang memisahkan antara warga negara dengan negara yang menjadi miliknya.

Di bidang pertanian, pembangunan yang menjadi bersifat ideologis (pembangunanisme) juga menciptakan situasi paradoxal. Revolusi hijau yang dianggap sebagai formula manjur untuk meningkatkan hasil pangan dengan melakukan teknologisasi pertanian dan penerapan input teknologi kimiawi telah memabat habis pengetahuan dan kearifan lokal para petani yang tumbuh sejak berabad-abad lalu. Padahal revolusi hijau adalah modernisasi pertanian yang didisain oleh perusahaan multi nasional (baca : kapitalisme internasional) yang melibatkan lembaga riset raksasa dunia seperti IRRI (*International Rice Research Institut*) di Filipina, IMMYT (*International Maize and Wheat Improvement Center*) di Mexico dan 13 lembaga riset semacam yang dikelola oleh CGIAR (*the Consultative Group for International Agriculture Research*). Lembaga-lembaga itu tak lain tujuannya adalah mereduksi cara bertani yang beraneka ragam menjadi satu cara produksi sesuai rekomendasi mereka (Anharudin, 1993:68).

Cara produksi pertanian para petani di dunia Ketiga yang telah berlangsung hampir 5000 tahun dengan memilih dan menanam kembali bibit-bibit mereka sendiri yang didasarkan atas kearifan klimatologis lingkungannya telah diporak-porandakan oleh Revolusi Hijau. Para petani tidak lagi memproduksi bibit sendiri, karena bibit sudah menjadi milik korporasi multinasional dan karena bibit lokal petani dianggap “ primitif “ dan “ inferior “ oleh ideologi teknologi modern yang berakar pada kapitalisme. Padahal bibit lokal petani telah bertahun-tahun terbukti tahan hama, sementara bibit unggul bukan saja tidak tahan tetapi juga memunculkan hama baru. Varietas IR-8 (1968) menderita hama tahun 1969 dan tahun 1972 hama “ tungro “ menghancurkan IR-8. IR-20 sebagai pengganti IR-8 terkena Wereng Coklat di tahun 1973 sedangkan IR-26 juga terkena hama baru.

Dampak lanjutan dari Revolusi Hijau adalah pada mekanisme penawaran permintaan pupuk dan pestisida yang dibutuhkan petani. Dengan varietas baru berarti diperlukan jenis pupuk dan pestisida yang baru dan kedua hal ini segera menjadi komoditas baru yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang semata-mata mengejar profit. Melalui bekerja sama dengan birokrat di departemen pertanian dan birokrasi tingkat kecamatan dan desa, para pengusaha pupuk dan pestisida secara sepihak menentukan harga produk mereka dengan monopsonistik, sehingga seringkali hasil panen tak sebanding dengan biaya tanam dan biaya pemeliharaan tanaman.

Dampak lebih jauh lagi sebagai akibat modernisasi dan pembangunanisme pertanian, di Jawa khususnya, terjadi konsentrasi pemilikan tanah. Para petani

gurem yang tak mampu mengakomodasi biaya tanam dan pemeliharaan yang menjadi begitu mahal, memilih menjual tanahnya ke petani berlahan luas yang akomodatif, atau kepada para “ spekulasi ” orang kota, yang juga menyewakan tanahnya kepada petani pengusaha. Maka yang terjadi adalah marjinalisasi dan polarisasi. Para petani yang kemudian menjadi “ *landless* ” kemudian harus menjual tenaganya sebagai buruh murah di kota-kota sebab peluang kerja di desa telah diganti oleh mesin-mesin pertanian yang justru dimiliki orang berpunya. Demikian juga tenaga kerja wanita di pedesaan yang semula bisa menjadi “ penderep ” atau melakukan kegiatan bercocok tanam yang lain terpaksa menganggur dan sebagian dari mereka mencari pekerjaan di kota sebagai buruh industri, pembantu rumah tangga atau terpaksa menjadi pelacur di kota. Terbukti secara statistik bahwa yang mendekati 50% tingkat pengangguran adalah di sektor pertanian.

Paradox modernitas juga muncul dalam masalah penerimaan, pengelolaan dan pengembalian bantuan luar negeri. Hal ini terkait erat dengan konsep dasar modernisasi yang pada mulanya memang sebagai “ paket bantuan ” dari negara-negara industrial-kapitalis sebagai rekayasa yang dimaksudkan untuk membendung pengaruh sosialisme-komunisme di negara-negara ketiga yang berisi teori (berikut asumsi-asumsi ideologisnya), cara penerapan, konsultan ahli dan suntikan modal berupa pinjaman jangka panjang. Tanpa bantuan yang lengkap tersebut mustahil negara-negara miskin yang baru merdeka bisa melaksanakan modernisasi, sebab disamping tak memiliki pengetahuan dan

tenaga terampil yang cukup juga tak tersedianya modal untuk menciptakan sarana dan prasarana bagi modernisasi tersebut.

Dengan memilih “ jalan kapitalisme “ maka mengalir modal ke negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Akan tetapi dengan terlalu lamanya Orde Baru berkuasa sehingga mengekalkan *vested interest* para elitnya serta dengan merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme, mengakibatkan pengelolaan utang luar negeri menjadi tidak efisien. Ditengarai oleh Sumitro Joyohadikusumo terjadi inefisiensi utang luar negeri sampai 30%. Terlalu banyaknya *vested interest* dan lemahnya mekanisme kontrol menjadikan banyak program yang dibiayai utang luar negeri tersebut hasilnya tidak bisa maksimal, bahkan banyak yang salah sasaran.

Di pihak lain ideologi modernisasi telah mematok keyakinan seolah faktor bantuan luar negeri menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan proses modernisasi. Hal ini bisa dilihat pada meningkatnya secara signifikan dari tahun ke tahun besarnya utang luar negeri Indonesia. Besarnya cicilan utang luar negeri (cicilan pokok ditambah bunganya) dari tahun ke tahun, dimulai 1986, lebih besar dari utang baru yang diterima setiap tahun anggaran baru. Utang luar negeri Indonesia sampai dengan 1994 tercatat US\$ 87,6 miliar dengan total utang swasta sebesar US\$ 30 miliar. Rata-rata 42,28 % dari anggaran pembiayaan digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Dalam catatan Sritua Arief dan Arief Budiman (1987) diketahui sepanjang periode 1970-1986 dalam setiap tahun rata-rata hampir 90 % dari persediaan sumber pembiayaan hasil transaksi luar negeri Indonesia telah dibayarkan kepada pihak asing. Karena hasil

perdagangan luar negeri (ekspor-impor) tidak bisa diharapkan untuk menyelamatkan anggaran belanja negara, maka banyuan luar negeri menjadi alternatif pilihan pembiayaan pembangunan.

Biasanya di belakang segala bantuan atau pinjaman asing selalu terdapat prasyarat untuk menggunakan tenaga konsultan asing, teknologi dan peralatan serta hak jual hasilnya yang telah ditentukan oleh pihak negara donor. Dalam kasus pinjaman bilateral Jepang 79% dari dana bantuan tersebut akan mengalir kembali ke Jepang. Selama kurun waktu 1973-1990 secara kumulatif arus investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US\$ 5,8 miliar. Pada saat yang sama keuntungan yang diraih dan dibawa keluar dari Indonesia dalam bentuk laba oleh investor asing mencapai US\$ 58,9 miliar. Ini berarti : untuk setiap US\$ 1 yang dibawa investor ke Indonesia akan diikuti dengan keluarnya US\$ 10,19 dari perekonomian Indonesia (Dedi Haryadi, 1995 : 105). Hal ini bisa dilihat sebagai terjadinya transfer kapital atau pemindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. Dalam hal ini terjadi paradox ketika keinginan menambah modal justru diikuti oleh larinya modal yang lebih besar dan dengan begitu bantuan justru menjadi beban.

Implikasi penting utang luar negeri adalah terjadinya ketergantungan negara penerimanya terhadap negara donor. Hal ini bukanlah semata-mata masalah moneter atau perhitungan antara jumlah pinjaman dan jumlah pengembalian. Di balik " jasa baik " pemberian utang luar negeri, negara-negara donor menginginkan negara-negara kreditur menjadi ladang subur penanaman modal perusahaan-perusahaan mereka, bahkan sekaligus untuk menempatkan

tenaga-tenaga kerja mereka. Sudah bisa dipastikan secara logika ekonomi, negara-negara donor akan memprioritaskan proyek-proyek pembangunan yang dapat menunjang kantong-kantong industri dan perdagangan mereka, yang sebagian dengan tidak memperdulikan pengorbanan masyarakat. Maka cukup beralasan jika Teresa Hayter (1972) menyebut bantuan luar negeri sebagai “ imperialisme terselubung “.

Atas nama pembangunan agenda pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang ditentukan atas skenario dan intervensi lembaga-lembaga moneter internasional. Negara-negara maju selaku pemegang saham mayoritas di World Bank misalnya, dapat memaksakan agenda kepentingan mereka ke dalam kebijakan pemerintah negara berkembang. Jadi bantuan luar negeri menjadi alat untuk mengikat negara peminjam dalam “ kerangkeng “ ekonomi yang diciptakan negara donor sehingga para debitur ini bisa mengeksploitasi sumber daya alam dan manusianya bagi kepentingan perusahaan mereka sedemikian rupa. Utang luar negeri menjadi alat imperialisme modern yang cukup efektif untuk menguasai perkembangan sekelompok masyarakat oleh masyarakat lain (Dianto Bachriadi, 1995:5). Situasi paradoxnya adalah ketika kondisi ini tidak disikapi secara kritis maka negara-negara berkembang, khususnya dalam wacana ini Indonesiaa, secara sadar maupun tidak sadar telah mengorbankan kesejahteraan rakyatnya sendiri dan bahkan juga pada gilirannya mengorbankan pembangunan itu sendiri.

Refleksi dari berbagai kondisi paradox modernitas di atas adalah apabila semangat manusia untuk pertama kalinya di masa *Renaissance dan Aufklarung* (abad ke-14 dan ke 17) adalah ingin bebas dari dari belenggu feodalisme,

tradisionalisme, ortodoksi dogma-dogma agama dan berbagai penindasan atas kebebasan berpikir dan bertindak mereka telah membawa negara-negara Barat menjadi bangsa modern dan kemudian mentransformasikan pengalaman kemajuan mereka atas nama program modernisasi bagi negara-negara dunia ketiga. Sementara menghadapi program modernisasi tersebut negara-negara dunia ketiga menanggapinya dengan semangat yang sama untuk lepas dari berbagai belenggu, baik belenggu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketergantungan kepada bangsa lain. Tetapi ketika modernisasi sudah diterapkan dan menjadi modernisme, ketika pembangunan dilaksanakan dan cenderung menjadi pembangunanisme, terjadilah paradox modernitas. Negara-negara berkembang kembali terjebak pada ketergantungan bentuk baru, pembodohan, penindasan (baik oleh bangsa sendiri maupun secara tak langsung oleh bangsa lain yang lebih maju) dan mitos kemiskinan yang tak juga segera hilang.

Melalui modernisasi bangsa Barat ingin meraih kebebasan tetapi yang kemudian diraih justru belenggu birokrasi dan berjalannya sistem sosial ekonomi yang didasari oleh rasio instrumental, sedangkan bangsa-bangsa yang sedang berkembang justru terjebak oleh ketergantungan dan mitos-mitos pembangunanisme.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Setidaknya sejak Perang Dunia Kedua konsep “modernisasi” dan “pembangunan” muncul sebagai dasar teori bagi perubahan sosial di negara – negara Dunia Ketiga. Keinginan untuk menjadi bangsa yang maju menjadikan konsep tersebut sebagai “ideologi” bagi negara – negara Dunia Ketiga dalam mengembangkan dirinya; memecahkan kemiskinan, kebodohan dan segala atribut keterbelakangan.

Gagasan modernisasi dan pembangunan secara historis dilatarbelakangi oleh suatu usaha membendung semangat anti – Kapitalisme yang dikampanyekan oleh Blok Sosialis di negara – negara Dunia Ketiga. Gagasan ini secara resmi muncul ketika Amerika mengumumkan doktrin kebijakan luar negerinya pada 1949 yang secara eksplisit menggunakan istilah “*development*” dan “*underdevelopment*” sebagai bahasa resmi. Jadi konsep pembangunan pada dasarnya merupakan refleksi paradigma Barat tentang perubahan sosial untuk diterapkan di negara – negara Dunia Ketiga.

Karena sejak awalnya merupakan usaha untuk mencegah meluasnya paham Sosialisme, maka ideologi tersembunyi yang terdapat dalam konsep pembangunan adalah ideologi Kapitalisme – Liberalisme. Dengan demikian sebagai konsekuensi logisnya negara – negara Dunia Ketiga yang kemudian melaksanakan program pembangunan dengan merujuk teori modernisasi telah

mengambil “Jalan Kapitalisme”, sementara Kapitalisme itu sendiri secara *sui generis* – berdasar sosiologi Kritis – mengandung potensi krisis didalamnya.

Keinginan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan penerapan konsep modernisasi dan praktik pembangunan, di Indonesia, menjadikan penguasa Orde Baru menerapkan berbagai langkah – langkah implementasi modernisasi yang cenderung represif dan mengabaikan kritik dan partisipasi rakyat banyak. Terjadi perilaku politik yang “menyimpang” dari jalur demokrasi dan perilaku ekonomi yang juga “menyimpang” dari karakter asli kapitalisme pasar bebas, yakni mendistorsinya dengan perilaku KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dari jajaran birokrasi dan elite kekuasaan sehingga menciptakan kapitalisme perkoncoan.

Potensi krisis dalam kapitalisme yang dalam melakukan maksimasi keuntungan, akumulasi modal dan *mode of production* – nya bersifat eksploitatif dan yang dalam ekspansi kulturalnya didasari “rasio instrumental, membawa sistem produksi – industrial kapitalistik kepada situasi paradox modernitasnya. Paradox modernitas ini menggejala dalam berbagai bentuk (hasil) penerapan teori modernisasi di Indonesia. Berbagai gejala yang mencerminkan paradox modernitas ini berpadu dengan perilaku kekuasaan dan perilaku ekonomi Orde Baru yang korup mengantarkan bangsa ini kepada terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan selanjutnya menciptakan krisis multi – faset yang akhirnya bermuara pada krisis legitimasi dan bangkrutnya kekuasaan Order Baru.

Krisis legitimasi dan bangkrutnya Orde Baru tersebut tidak lepas dari berbagai irasionalitas yang mengiringi model modernisasi yang diterapkan, yang terlalu positivistik dan teknokratis. Irasionalitas ini meliputi terjadinya birokratisasi yang mengarah pada gejala munculnya “*iron cage*”, pembodohan dalam nalar masyarakat, hilangnya berbagai “*local genius*” di bidang pertanian serta dalam hal pengelolaan hutang luar negeri yang kesemuanya justru menciptakan ketergantungan dan kemiskinan struktural.

Agar ‘peristiwa naas’ yang menimpa Orde Baru dan menyengsarakan sebagai besar rakyatnya ini tidak diulangi oleh orde – orde selanjutnya dalam sejarah panjang bangsa Indonesia ke depan, maka perlu dilakukan koreksi terhadap rasionalitas formal pelaku ekonomi di Indonesia. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh intervensi struktural dari sebuah pemerintahan yang transparan dan demokratis dalam mekanisme pasar. Suatu pemerintahan yang *concern* terhadap terbentuknya suatu masyarakat terbuka (*open society*) yang mengakui rakyat sebagai subyek utamany. Tetapi hal itu saja belum cukup tanpa adanya intervensi dari elemen – elemen kekuatan pro – demokrasi yang tidak terlibat aktivitas akumulasi modal. Elemen – elemen pro demokrasi ini adalah segenap potensi rakyat seperti lembaga swadaya masyarakat, intelektual yang berpikiran merdeka dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. Francais, 1991, *Modernisasi di Dunia Ketiga*. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Arndt, H.W. 1992, *Pembangunan Ekonomi, Studi tentang Sejarah Pemikiran*, Jakarta, LP3ES.
- Bakker, Anton, 1986, *Ilmu – ilmu Sosial yang Menempatkan Manusia Sebagai Subyek*, Yogyakarta, Fakultas Filsafat.
- Berger, Peter L., 1969, *The Sacred Canopy, Elements of Sociological Theory of Religion*, New York, Doubleday Anchor Book.
- _____, 1878, *Pyramids of Sacrifice*, New York, Anchor Press.
- Bernstein, R.J., (ed), 1985, *Habermas and Modernity*, Oxford, Polity Press.
- Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia.
- Giddens, Anthony, 1985, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Jakarta, UI Press.
- Habermas, Jurgen, 1974, *Toward a Rational Society*, London, Heinemann.
- _____, 1884, *The Theory of Communicative Action*. Boston, Beacon Press.
- _____, 1987, *The Philosophical Discourse of Modernity*. Massachuset, MIT Press.
- _____, 1990, *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Jakarta. LP3ES.
- Hardiman, Budi, 1990, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta, Kanisius.
- _____, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Johnson, Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mills, C. Wright, 1959, *The Sociological Imagination*, Harmondsworth, Middlesex, Penguin Book, Ltd.
- Moleong, Lexy J., 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Karya.
- Nasikun, 1999, *Menuju Pembangunan Pluralisme, Lokalisme dan Kembalinya Komunitas Politik*, makalah seminar, Yogyakarta, P3PK – UGM.

- Rifai, Bachtiar Tb., 1986, *Perspektif Dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, Jakarta, Gramedia.
- Saefuddin, hetifah, Juni Thamrin, (ed.), 1995, *Menyingkap Retorika dan Realita, Refleksi, dan Visi Jejak 50 Tahun Indonesia*, Bandung, Akatiga.
- Schas, Wolfgang, (ed.), 1994, *Kritik Atas Pembangunanisme, Telaah Pengeahuan Sebagai Alat Penguasaan*, Jakarta, CPSM.
- Sindhunata, 1982, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Jakarta. Gramedia.
- Soetrisno, Loekman, 1996. *Menuju Masyarakat Transformatif*, Yogyakarta, Kanisius,
- Tim Redaksi Driyarkara, 1993. *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Weiner, Myron, (ed.), 1977, *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*, Yogyam Gadjah Mada University Press.

LAMPIRAN :

CURICULUM VITAE**I. KEPALA PROYEK PENELITIAN**

- A.
1. Nama Lengkap : EDY HERRY PRYHANTORO, Drs. MSi.
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Tempat/ Tgl. Lahir : Wonosobo/ 13 Maret 1964
 4. Alamat Sekarang : Jl. Jawa No.2 Buduran Sidoarjo
 5. Status Perkawinan : Kawin
 6. Pekerjaan Sekarang : Dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Jurusan Fisiologi
 7. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya
 8. Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Utama :
 - Asisten Direktur Bidang Operasional Balai Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Fisip Unair.
 - Penulis Lepas (Artikel)
 - Dosen Luar Biasa (LB) pada beberapa PTS di Surabaya.
 - Dosen Luar Biasa (LB) pada Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya.
 - Sekretaris Eksekutif Lembaga Transforum
 9. Pendidikan :

UNIVERSITAS / INSTITUT DAN LOKASI	GELAR	TAHUN SELESAI	BIDANG STUDI
Universitas Gadjah Mada	Drs	1990	Filsafat Barat
Universitas Gadjah Mada	MSi	2000	Sosiologi

Pengalaman kerja dalam penelitian dan pengalaman profesional serta kedudukan saat ini :

INSTITUSI	JABATAN	PERIODE KERJA
- Jurusan Sosiologi FISIP Unair	Staf Dosen	1991-sekarang
- Laboratorium masalah-masalah sosial FISIP Unair	Peneliti	1995-sekarang
- Balai Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-BKPSDM Unair	Wakil Direktur Operasional	1993-2000
- Lembaga TRANSFORUM	Sekretaris Eksekutif	2003-sekarang

B. PRESTASI DAN PENGALAMAN BERORGANISASI :

1. Mahasiswa Teladan I Fakultas Filsafat UGM (1988)
2. Juara I tingkat nasional LKIP (Lomba karya inovatif produktif) LIPI-Dirjen Dikti di Jakarta (1987)
3. Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Filsafat UGM (1985-1987)
4. Juara II Lomba Pidato (mewakili UGM) Antar Perguruan Tinggi se Daerah Istimewa Yogyakarta (1988)
5. Redaktur Buletin Mahasiswa DIALOGIKA Fak. Filsafat UGM (1986-1988)
6. Anggota FKDMI (Forum Kerja dan Diskusi Mahasiswa Indonesia) (1989-1990)

**C. PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH :
PENELITIAN :**

No.	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Biaya	Keterangan
1.	Pengaruh Konsumtivismisme Terhadap Pola Pikir & Kehidupan Mahasiswa Di Yogyakarta	1998	Dirjen DIKTI	Juara I Nasional LKIP
2.	Tingkat Pendidikan Wanita Pekerja Sektor Informal Dan Determinasinya Terhadap Pengembangan Masa Depan Anaknya.	1992	Lemlit UNAIR	Ketua Peneliti
3.	Pola Perilaku Remaja Berlalu Lintas Di Kodya Surabaya	1993	Lemlit UNAIR	Anggota

4.	Strategi Adaptasi Sosial-Budaya Para Istri Pegawai Negeri Gol. I Dan II Terhadap Tuntutan Hidup Di Kota Besar.	1994	Lemlit UNAIR	Ketua Peneliti
5.	Gejala Inkapsulasi Sebagai Mekanisme Survival PK-5 Etnik Madura Di Surabaya	1996	TOYOTA Foundation	Peneliti Tunggal
6.	Gaya Hidup Kota Dan Etos Kerja Profesional Muda Di Surabaya	1996	Dirjen DIKTI	Ketua Peneliti
7.	Pola Aliansi Buruh Dan Mahasiswa Dalam Berbagai Aksi Modok Dan Unjuk Rasa Di Jawa Timur	1997	TOYOTA Foundation	Anggota
8.	Pergeseran Makna Solidaritas Sosial Di Pemukiman Elite Darmo Satelit Town Surabaya.	1997	Lemlit UNAIR	Anggota
9.	Jurnalisme Gender, Kebijakan Redaksional Surat Kabar di Jatim	1999	DP3M	Ketua Peneliti
10.	Community Enterprises Sebagai Alternatif Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan.	2000	DP3M	Ketua Peneliti
11.	Paradox Modernitas dalam Kapitalisme Orde Baru	2002	Dirjen DIKTI	Peneliti Tunggal
12.	Irasionalitas dalam Modernisasi : Studi Tentang Dampak Pembangunan dalam Perspektif Teori Kritis.	2003	DP3M	Peneliti Tunggal

D. PENULISAN ILMIAH

1. Fenomenologi Sebagai Metode : Relevansinya Bagi Pembaharuan Metode Ilmu-Ilmu Sosial. (1990), Skripsi Sarjana, tengah direvisi/diedit untuk diterbitkan sebagai buku oleh PT. Rajawali Press Jakarta.
2. Teori Kebenaran Fenomenologis. (1995), JOURNAL FILSAFAT, Penerbit Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
3. Banyak menulis Makalah Seminar (sebagai pembicara) dan menulis artikel ilmiah-populer di beberapa surat kabar (Surabaya Post, Surya dan Suara Pembaruan)
4. Paradox Modernitas dalam Pembangunanisme (2002) Journal Ilmu Sosial HUMANIKA, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Surabaya, 20 Maret 2004

Drs. EDY HERRY PRYHANTORO, Msi
NIP. 132 009 468